



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS MUNADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3. NHK : 476304

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m²/150 m² di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 221.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH F709RE- GMNFD/MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT D1802N13L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.192.684

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 580.192.684

III. HUTANG Rp. 88.330.848

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 491.861.836

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.